

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera serta makmur. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menaruh perhatian besar terhadap terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Hal ini tercermin secara jelas dalam alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Namun dalam melakukan pembangunan tersebut masih terhalang dengan adanya masalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat ketimpangan dalam distribusi pendapatan, perbedaan kualitas sumber daya manusia yang menciptakan disparitas upah serta kesenjangan dalam akses terhadap modal, sehingga konsep ini dijelaskan melalui teori siklus kemiskinan.² Kemiskinan menjadi fenomena yang sering dijumpai dan kerap dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin di suatu negara, hal ini mencerminkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemiskinan masih menjadi masalah umum yang dihadapi oleh negara berkembang salah satunya yaitu Indonesia.

Dalam berbagai upaya membangun kesejahteraan di Indonesia kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius. Kemiskinan menjadi dasar yang mempengaruhi kehidupan di masa depan. Di negara berkembang, kemiskinan merupakan fenomena yang terus berulang dan menjadi beban besar bagi negara seperti Indonesia. Kemiskinan masih menjadi isu yang selalu berkembang baik itu ditingkat Nasional maupun di tingkat daerah. Berdasarkan data dari

¹ Prawoto, Nano. 2009. Memahami Kemiskinan dan Cara Penanggulangannya, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 9 No 1, hlm. 57.

² Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 7(2), hlm. 274.

Badan Pusat Statistik Indonesia perkembangan kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, September 2022 dan Maret 2023

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
	Perkotaan		Perdesaan		Total	
	Sep'22	Mar'23	Sep'22	Mar'23	Sep'22	Mar'23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Aceh	10,35	9,79	17,06	16,92	14,75	14,45
2. Sumatera Utara	8,63	8,23	7,96	8,03	8,33	8,15
3. Sumatera Barat	4,90	4,67	7,20	7,23	6,04	5,95
4. Riau	6,49	6,73	7,07	6,65	6,84	6,68
5. Jambi	10,48	10,19	6,32	6,28	7,70	7,58
6. Sumatera Selatan	11,37	11,07	12,30	12,21	11,95	11,78
7. Bengkulu	14,53	14,21	14,24	13,96	14,34	14,04
8. Lampung	8,34	8,02	12,96	12,65	11,44	11,11
9. Kep. Bangka Belitung	3,48	3,54	6,13	5,85	4,61	4,52
10. Kepulauan Riau	5,46	5,05	10,63	10,69	6,03	5,69
11. DKI Jakarta	4,61	4,44	-	-	4,61	4,44
12. Jawa Barat	7,52	7,19	9,75	9,30	7,98	7,62
13. Jawa Tengah	10,02	9,78	12,05	11,87	10,98	10,77
14. DI Yogyakarta	10,64	10,27	14,00	13,36	11,49	11,04
15. Jawa Timur	7,78	7,50	13,90	13,98	10,49	10,35
16. Banten	5,89	6,00	7,29	6,79	6,24	6,17
17. Bali	4,12	3,77	5,58	5,50	4,53	4,25
18. Nusa Tenggara Barat	13,98	13,76	13,66	13,95	13,82	13,85
19. Nusa Tenggara Timur	9,00	9,12	24,11	23,76	20,23	19,96
20. Kalimantan Barat	4,63	4,44	8,10	8,07	6,81	6,71
21. Kalimantan Tengah	5,09	4,78	5,32	5,35	5,22	5,11
22. Kalimantan Selatan	4,03	3,84	5,17	4,72	4,61	4,29
23. Kalimantan Timur	4,97	4,68	9,71	9,28	6,44	6,11
24. Kalimantan Utara	5,58	5,18	9,15	8,74	6,86	6,45
25. Sulawesi Utara	5,04	4,91	10,16	10,38	7,34	7,38
26. Sulawesi Tengah	9,13	8,90	13,79	14,09	12,30	12,41
27. Sulawesi Selatan	4,98	5,01	11,81	11,91	8,66	8,70
28. Sulawesi Tenggara	7,22	7,40	13,60	13,94	11,27	11,43
29. Gorontalo	4,49	4,47	24,52	23,73	15,51	15,15
30. Sulawesi Barat	9,33	9,08	12,58	12,10	11,92	11,49
31. Maluku	5,90	5,49	24,54	24,64	16,23	16,42
32. Maluku Utara	6,17	6,23	6,45	6,55	6,37	6,46
33. Papua Barat	7,64	8,23	32,12	29,20	21,43	20,49
34. Papua	5,29	5,68	35,68	34,49	26,80	26,03
Indonesia	7,53	7,29	12,36	12,22	9,57	9,36

Sumber: bps.go.id Tahun 2023

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia ini menunjukkan penurunan sebesar 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022, dan turun 0,26 juta orang dibandingkan Maret 2022. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan September 2022 dan berkurang 0,18 persen poin dibandingkan Maret 2022. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui masih terdapat 25,90 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang memunculkan situasi yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Berbagai aspek kehidupan dapat terhambat dengan adanya kemiskinan seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Dampak yang paling dapat dirasakan dengan adanya kemiskinan berupa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik, cukup, serta bergizi. Pemenuhan kebutuhan pangan yang baik dan bergizi seimbang sulit terpenuhi oleh masyarakat miskin karena penghasilan mereka yang sangat rendah.

Komoditas pangan merupakan penyumbang terbesar yang menyebabkan adanya kemiskinan. Peningkatan harga pangan akan meningkatkan garis kemiskinan sehingga berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Melonjaknya harga pangan memiliki dampak yang lebih merugikan pada masyarakat miskin. Perubahan harga pokok komoditas bahan makanan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat miskin hingga saat ini. Perkembangan garis kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2023

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan (GKM)	Non-Makanan (GKNM)	Total (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2022	377.958	143.536	521.494
Maret 2023	415.588	153.711	569.299
Perdesaan			
Maret 2022	370.096	114.113	484.209
Maret 2023	399.460	125.590	525.050
Perkotaan + Perdesaan			
Maret 2022	374.455	131.014	505.469
Maret 2023	408.522	141.936	550.458

Sumber: bps.go.id Tahun 2023

Dari gambar 1.2 terlihat Garis kemiskinan selama Maret 2022- Maret 2023 di Indonesia baik perkotaan maupun perdesaan. Garis kemiskinan nasional mengalami kenaikan sebesar 8,90 persen, dari Rp505.469,00 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp550.458,00 per kapita per bulan pada Maret 2023. Adapun garis kemiskinan di daerah perkotaan meningkat 9,17 persen, sedangkan di daerah perdesaan naik 8,34 persen. Berdasarkan dengan hal itu sangat jelas bahwa komoditas makanan berperan besar dalam mempengaruhi garis kemiskinan di Indonesia. Pemerintah berperan dalam menangani masalah kemiskinan dengan melakukan berbagai upaya dan menyusun rencana yang akan dilakukan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan. Salah satunya yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Peraturan Presiden ini menyebutkan bahwa, presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Dalam peraturan ini dijelaskan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga.³ Kedua instruksi tersebut ditujukan kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga serta seluruh gubernur dan bupati/wali kota. Dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,12% dari target 0% yang ditetapkan pemerintahan Indonesia.

³ Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Berkaitan dengan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah atas diterbitkannya Inpres nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka Pemerintah Provinsi Riau mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem. Dalam rapat koordinasi teknis tersebut dilakukan penandatanganan komitmen antara Gubernur Provinsi Riau dengan seluruh bupati/walikota sekaligus penyerahan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).⁴ Kegiatan ini dilakukan agar setiap daerah dapat bersinergi dalam memperhatikan kondisi kesejahteraan daerahnya masing-masing sesuai dengan komitmen yang telah dilakukan agar Masyarakat tidak berada dibawah garis kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan di Provinsi Riau dapat dilihat dari Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Garis Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2023

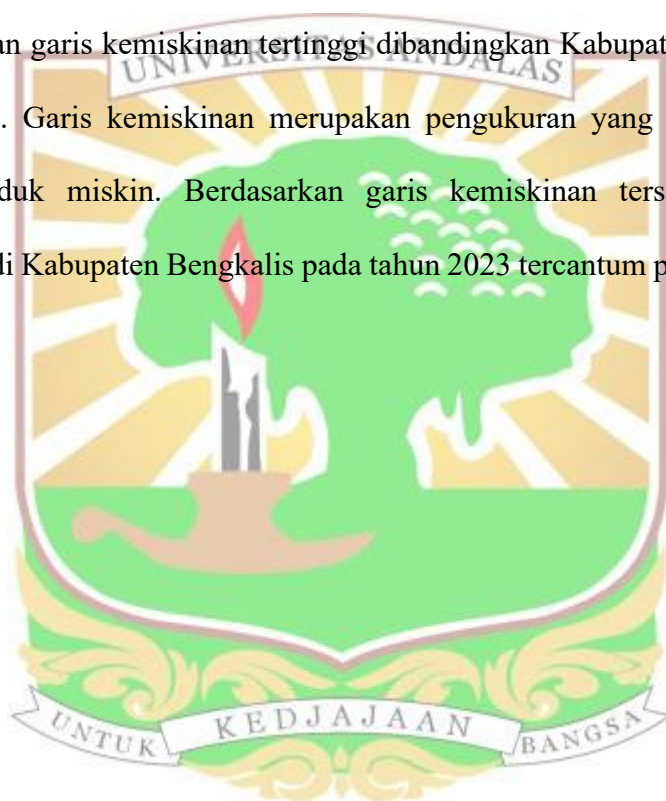
No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
1	Kuantan Singingi	693.493
2	Indragiri Hulu	626.671
3	Indragiri Hilir	597.122
4	Pelalawan	689.786
5	Siak	558.867
6	Kampar	547.696
7	Rokan Hulu	647.599
8	Bengkalis	713.826
9	Rokan Hilir	511.610

⁴ Media Center Riau. 2020, 21 November. *WAGUBRI BUKA RAPAT KOORDINASI TKPK PROVINSI RIAU TAHUN 2021*. <https://mediacenter.riau.go.id/read/66973/wagubri-buka-rapat-kooordinasi-tkpk-provinsi-r.html>

10	Kepulauan Meranti	623.576
11	Kota Pekanbaru	712.000
12	Kota Dumai	601.348
RIAU		658.611

Sumber: bps.go.id Tahun 2023

Pada Tabel 1.1 terlihat garis kemiskinan Provinsi Riau perkapita pada tahun 2023 Rp. 658.611. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa garis kemiskinan Kabupaten Bengkalis merupakan garis kemiskinan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar Rp.713.826. Garis kemiskinan merupakan pengukuran yang diperuntukkan dalam menetapkan penduduk miskin. Berdasarkan garis kemiskinan tersebut adapun jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 tercantum pada tabel 1.2 dibawah ini:



Tabel 1.2 Kemiskinan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin
1	Bengkalis	5.877
2	Bukit Batu	3.633
3	Mandau	12.106
4	Rupat	7.399
5	Rupat Utara	2.712
6	Siak Kecil	3.831
7	Pinggir	8.188
8	Bandar Laksamana	2.011
9	Talang Muandau	2.567
10	Bathin Solapan	12.076
11	Bantan	7.644
Jumlah		68.044

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 masih terdapat 68.044 keluarga yang tergolong miskin dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan komitmen yang telah disepakati pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem oleh Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis memberikan bantuan program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi. Program tersebut dibentuk sesuai dengan arahan yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem dalam hal pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dengan cara pengendalian dampak inflasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi merupakan bentuk bantuan dalam mengatasi inflasi yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Bantuan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dari adanya kenaikan harga komoditas bahan makanan pokok pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri serta NATARU. Pada saat tersebut kebutuhan menjadi meningkat sehingga terjadi lonjakan atau kenaikan harga pada bahan pokok makanan yang berdampak pada daya beli masyarakat miskin dan kurang mampu.⁵

Dalam Pelaksanaannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis bekerjasama dengan Perum Bulog sebagai penyedia sembako yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Perum Bulog melakukan penyaluran paket sembako setiap periode pelaksanaan ke masing-masing kelurahan. Sebelum Perum Bulog melakukan penyaluran, pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perum Bulog melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait jadwal distribusi paket sembako ke masing-masing kelurahan berdasarkan agenda yang telah ditetapkan. Dalam proses penyalurannya, pengiriman dari gudang Bulog ke kelurahan menjadi tanggung jawab penuh Perum Bulog.

⁵ Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi

Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis. Bantuan yang diberikan melalui program ini berupa:⁶

- a) Beras
- b) Gula
- c) Minyak goreng

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan mekanisme diperlukan agar dapat berjalan terarah dan terstruktur agar dapat mencapai tujuan tertentu. Adapun mekanisme yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi Sebagai Berikut:

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis menetapkan kuota bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing kecamatan.
- b) Kecamatan membagi kuota bantuan per kelurahan
- c) Usulan calon keluarga penerima bantuan diberikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan usulan dari kepala desa/lurah setelah melakukan proses verifikasi dan validasi.
- d) Penerima bantuan disahkan melalui surat keputusan bupati berdasarkan data yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e) Bulog bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Bulog bekerjasama untuk menyediakan kebutuhan pokok dan mendistribusikan ke kelurahan/desa sesuai jumlah yang telah ditetapkan.

⁶ Ibid, hlm 5

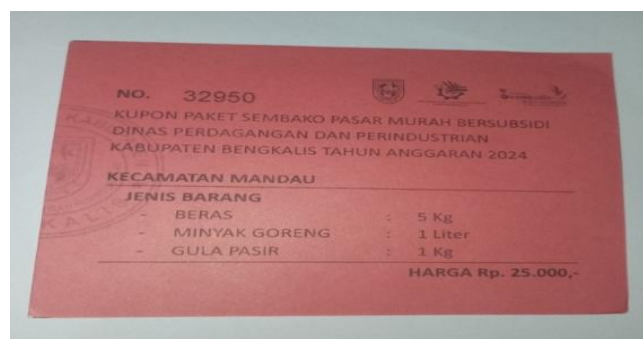
- f) Pada saat pendistribusian yang dilakukan bulog ke kelurahan/desa, petugas kecamatan bidang kesejahteraan sosial dan budaya Kecamatan melakukan monitoring.
- g) Pemberian bantuan diserahkan pihak kelurahan kepada KPM maksimal 3 hari setelah pendistribusian.

Penerima bantuan paket sembako pasar murah berubsidi ditetapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang harus dipenuhi sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu:⁷

- a) Masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu.
- b) Masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Bukan aparatur sipil negara, pensiunan aparatur sipil/negara, TNI/POLRI, dan bukan pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan usaha milik daerah.

Bantuan yang diberikan dalam bentuk kupon yang telah disediakan. Berikut merupakan bentuk kupon dari bantuan paket sembako pasar murah bersubsidi Kabupaten Bengkalis:

Gambar 1.3 Tampilan Kupon Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi



Sumber: DISPERINDAG Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

⁷ Ibid, hlm 5

Pada gambar 1.3 terlihat bahwa pada kupon paket sembako pasar murah bersubsidi Kabupaten Bengkalis tersebut, tercantum nomor kupon dan kecamatan yang menerimanya serta jenis sembako yang akan didapatkan. Sembako yang diberikan terdiri dari 3 jenis yaitu, lima kilogram beras, satu liter minyak goreng dan satu kilogram gula pasir dengan nominal Rp. 25.000 yang nantinya akan ditukarkan sesuai dengan harga yang harus dibayarkan oleh keluarga penerima manfaat. Sembako tersebut disediakan oleh Bulog Kabupaten Bengkalis berdasarkan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Adanya bantuan ini agar dapat mempertahankan harga jual energi domestik dengan menekankan harga asli barang senilai Rp. 150.000 melalui subsidi yang diberikan sehingga mengantisipasi masyarakat tidak berada dibawah garis kemiskinan.

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan program paket sembako pasar murah bersubsidi tahun 2024 di Kabupaten Bengkalis diuraikan dalam tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan program paket sembako pasar murah bersubsidi Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin	Kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	
			Tahap I	Tahap II
1	Bengkalis	5.877	8000	-
2	Bukit Batu	3.633	2700	-
3	Mandau	12.106	33000	-
4	Rupat	7.399	2000	-
5	Rupat Utara	2.712	1500	-
6	Siak Kecil	3.831	2900	-

7	Pinggir	8.188	18000	-
8	Bandar Laksamana	2.011	2000	-
9	Talang Muandau	2.567	5000	-
10	Bathin Solapan	12.076	20400	-
11	Bantan	7.644	4500	-
Jumlah		68.044	100.000	-

Sumber: Dokumen Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa total jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan sembako subsidi di Kabupaten Bengkalis Pada Tahun 2024 dilakukan hanya satu tahap dengan jumlah 100.000 paket sembako. Pelaksanaan program paket sembako pasar murah bersubsidi tidak dilakukan pada tahap dua dikarenakan tidak adanya anggaran yang dijelaskan dalam wawancara dengan Muhammad Samsi Nirwansyah, ST selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

“Program paket sembako pasar murah bersubsidi di tahun 2024 dilakukan hanya satu tahap dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melaksanakan program pada tahap kedua. Tidak adanya anggaran ini dikarenakan pada tahun 2024 ini merupakan tahun politik, sehingga anggaran daerah banyak digunakan dalam menggelar Pemilihan Umum (PEMILU) dan PILKADA di Kabupaten Bengkalis.” (Wawancara dengan Muhammad Samsi Nirwansyah, ST Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 17 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan program paket sembako pasar murah bersubsidi tahun 2024 tidak dilakukan pada tahap kedua, dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun politik yang menggelar PEMILU dan Pilkada yang

meyebabkan tidak adanya anggaran sehingga program hanya dapat dilaksanakan dalam satu tahap saja.

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 Kecamatan penerima bantuan Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi terbanyak di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 adalah Kecamatan Mandau dengan 33.000 KPM, Kecamatan Bathin Solapan sebanyak 20.400 KPM dan Kecamatan Pinggir sebanyak 18.000 KPM. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Pinggir merupakan tiga kecamatan dengan masyarakat miskin terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Berikut jumlah penerima bantuan Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi di Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Pinggir tahun 2024:

Tabel 1. 4 Jumlah Penerima Bantuan Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi Setiap Kelurahan/Desa Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jumlah KPM	Kelurahan / Desa	Jumlah KPM
1	Bengkalis	8.000	Air Putih	250
			Damai	225
			Damon	250
			Kelapapati	480
			Kelebuk	200
			Kelemantan	200
			Kelemantan Barat	200
			Ketamputih	200
			Kota Bengkalis	250
			Kuala Alam	280

			Meskom	250
			Palkun	200
			Pangkalan	250
			Batang	
			Pangkalan	250
			Batang Barat	
			Pedekik	250
			Pematang Duku	250
			Pematang Duku	200
			Timur	
			Penampi	250
			Penebal	200
			Prapat Tunggal	200
			Rimba	250
			Sekampung	
			Sebauk	200
			Sekodi	250
			Senderak	200
			Senggoro	480
			Simpang Ayam	200
			Sungai Alam	250
			Sungai Batang	200
			Tameran	255
			Teluk Latak	400

			Wonosari	480
2	Bantan	4500	Bantan Air	200
			Bantan Sari	210
			Bantan Tengah	200
			Bantan Timur	200
			Bantan Tua	210
			Berancah	200
			Deluk	230
			Jangkang	160
			Kembung Baru	180
			Kembung Luar	200
			Mentayan	200
			Muntai	180
			Muntai Barat	160
			Pambang Baru	180
			Pambang Pesisir	200
			Pasiran	230
			Resam Lapis	180
			Selatbaru	240
			Sukamaju	200
			Teluk Lancar	200
			Teluk Pambang	160
			Teluk Papal	180
			Ulu Pulau	200

3	Bukit Batu	2700	Pangkalan Jambi	290
			Dompas	270
			Sejangat	270
			Pakning Asal	290
			Sungai Pakning	290
			Sungai Selari	270
			Batang Duku	270
			Buruk Bakul	270
			Bukit Batu	210
			Sukajadi	270
4	Siak Kecil	2900	Lubuk Muda	250
			Tanjung Belit	200
			Sumber Jaya	150
			Tanjung Datuk	125
			Liang Banir	125
			Sungai Siput	125
			Koto Raja	175
			Sepotong	150
			Lubuk Garam	200
			Lubuk Gaung	200
			Langkat	200
			Sungai Nibung	175
			Tanjung Damai	150
			Sungai Linau	150

			Sadar Jaya	175
			Muara Dua	175
			Bandar Jaya	175
5	Bandar Laksamana	2000	Tanjung Leban	280
			Sepahat	260
			Tenggayun	400
			Temiang	210
			Api-Api	240
			Parit Api-Api	180
			Bukit Kerikil	430
6	Rupat	2000	Batu Panjang	200
			Terkul	200
			Tanjung Kapal	165
			Pergam	155
			Darul Aman	115
			Mesim	115
			Sri Tanjung	130
			Teluk Lecah	130
			Pancur Jaya	80
			Parit Kebumen	95
			Pangkalan	150
			Nyirih	
			Pangkalan	95
			Pinang	

			Dungun Baru	80
			Hutan Panjang	80
			Makeruh	120
			Sungai Cingam	120
7	Rupat Utara	1500	Tanjung Medang	230
			Teluk Rhu	215
			Tanjung Punak	120
			Kadur	150
			Puteri Sembilan	150
			Hutan Ayu	180
			Titi Akar	250
			Suka Damai	205
8	Mandau	33.000	Air Jamban	10000
			Babussalam	3000
			Balik Alam	2000
			Batang Serosa	300
			Duri Timur	2500
			Duri Barat	3000
			Gajah Sakti	3000
			Pematang Pudu	3500
			Talang Mandi	3500
			Harapan Baru	900
			Bathin Betuah	1300
9		20400	Air Kulim	1200

	Bathin Solapan		Sebangar	2000
			Pamesi	700
			Bumbung	2000
			Petani	1000
			Boncah Mahang	2500
			Bathin Sobanga	1000
			Balai Makam	4500
			Simpang Padang	1000
			Pematang Obo	1000
			Kesumbo Ampai	1000
			Tambusai	2000
			Batang Dui	
			Buluh Manis	500
10	Pinggir	18.000	Titian Antui	2808
			Tengganau	1780
			Semunai	1852
			Pinggir	2128
			Buluh Apo	750
			Balai Raja	4026
			Muara Basung	2000
			Pangkalan Libut	1058
			Sungai Meranti	968
			Balai Pungut	630
11		5000	Beringin	650

	Talang Muandau	Koto Pait	450
		Beringin	
		Kuala Penaso	500
		Serai Wangi	500
		Tasik Tebing	450
		Serai	
		Tasik Serai	800
		Tasik Serai Barat	700
		Tasik Serai Timur	550
		Melibur	400

Sumber: Dokumen Disdagperin Tentang Kuota Penerima Sembako Pasar Murah Tahun 2024 Tahap I, 2025

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mandau terdapat Kelurahan Air Jamban sebagai kelurahan yang memiliki jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) terbanyak yaitu 10000 KPM, sedangkan di Kecamatan Bathin Solapan terdapat Kelurahan Balai Makam sebagai kelurahan yang memiliki jumlah KPM terbanyak yaitu 4500 KPM, dan di Kecamatan Pinggir terdapat Kelurahan Balai Raja sebagai kelurahan yang memiliki jumlah KPM terbanyak yaitu 4026 KPM. Berdasarkan paparan diatas peneliti memilih tiga kelurahan dengan pengelompokan kuota penerima terbanyak diantara kelurahan lainnya pada tiga kecamatan tersebut yaitu Kelurahan Air Jamban, Kelurahan Balai Makam dan Kelurahan Balai Raja sebagai lokasi penelitian.

Dalam pelaksanaan program paket sembako pasar murah bersubsidi ini peneliti menemukan permasalahan pada saat melakukan observasi awal penelitian. Sasaran dalam Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi adalah keluarga miskin dan kurang mampu, namun dari hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan terdapat keluarga penerima manfaat tergolong keluarga mampu yang berprofesi sebagai karyawan pada salah satu perusahaan minyak bumi dengan rentang penghasilan Rp. 5000.000 – 7000.000 keatas. Hal ini terjadi karena verifikasi data terkait keabsahan data penerima bantuan tidak dilakukan. Pemberian bantuan hanya melalui kriteria yang tergolong bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun penghasilan pekerjaannya tidak dapat dikatakan sebagai masyarakat miskin dan tidak mampu yang menyebabkan adanya indikasi tidak tepat sasaran.

Disisi lain ditemukan masyarakat yang kurang mampu berprofesi sebagai penjual bantal kapuk keliling tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut sama sekali, padahal sudah jelas bahwa masyarakat tersebut masuk sebagai kriteria penerima bantuan paket sembako pasar murah bersubsidi. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan ibuk desmawanti yang merupakan istri dari suaminya yang bekerja sebagai penjual bantal kapuk keliling sebagai berikut:

“Selama ni ibuk ndak pernah dapat bantuan apapun termasuk bantuan sembako yang kamu bilang itu, dari dulu sampai sekarang ga pernah. Padahal kalau ibuk dapat Alhamdulillah ya, apalagi bapak cuma keliling jual bantal” (wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Bengkalis, Desmawanti, pada hari Jumat 28, Juni 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, masih terdapat masyarakat yang merupakan sasaran paket sembako pasar murah bersubsidi yang belum pernah menerima bantuan tersebut, padahal masyarakat tersebut tergolong keluarga kurang mampu yang penghasilannya hanya bersumber dari jualan bantal kapuk keliling.

Penentuan masyarakat yang berhak menerima bantuan ini mengalami kendala dalam ketepatan sasaran karena adanya ketidaksesuaian antara data KPM dengan kriteria yang telah ditentukan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan bersama Marliya, SE.sy selaku Analisis perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis:

“Dalam program sembako pasar murah ini kami masih menemukan bahwa terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena terdapat pihak kelurahan sebagai pelaksana yang menentukan KPM tidak mengecek kembali data penerima sebelum diserahkan.” (wawancara dengan Marliya, SE.sy selaku Analisis perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 17 Desember 2024)

Dalam wawancara diatas, dijelaskan bahwa dalam program paket sembako pasar murah bersubsidi, masih terdapat masyarakat yang menerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Masalah ini muncul karena pihak kelurahan sebagai pelaksana program tidak melakukan pengecekan ulang terhadap data penerima sebelum penerima bantuan ditetapkan. Pengecekan data tersebut menyebabkan adanya penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem verifikasi bisa berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan.

Dalam pelaksanaan program paket sembako pasar murah bersubsidi di kelurahan, pelaksana pasar murah bersubsidi biasanya mencakup beberapa petugas yang saling berkoordinasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Struktur ini dapat melibatkan:

- a) Lurah: Bertanggungjawab dalam pelaksanaan program sembako subsidi di tingkat kelurahan dan mengarahkan kebijakan pelaksanaan.
- b) Sekretaris Kelurahan: Mendukung Kepala Kelurahan dalam memastikan semua kebijakan tersampaikan dan terarahkan dengan jelas.

- c) Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan: Panitia pelaksana kegiatan program sembako subsidi.
- d) Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kelurahan: panitia pelaksana kegiatan program sembako subsidi dalam mengamankan jalannya kegiatan.
- e) Staff Kelurahan: Petugas verifikasi/validasi data penerima bantuan sembako subsidi tingkat desa/kelurahan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa ada lima unsur pelaksana. satu diantaranya adalah staff kelurahan yang berkedudukan sebagai petugas verifikasi/validasi data. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan diketahui bahwa adanya ketidakpahaman terhadap tupoksinya sebagai pelaksana program, berikut wawancara dengan petugas Rika Azrina selaku petugas verifikasi/validasi data:

“saya disini hanya memasukkan atau mengentri data penerima bantuan yang telah diusulkan oleh RT masing-masing, untuk masalah kesesuaian kriteria penerima bantuan itu diserahkan kepada RT karena mereka yang lebih paham kondisiarganya.” Wawancara dengan Rika Azrina, petugas verifikasi/validasi data penerima program paket sembako pasar murah bersubsidi di Kelurahan Air Jamban, tanggal 24 Desember 2024)

Dalam wawancara diatas, dijelaskan bahwa petugas tersebut hanya melakukan tugas untuk memasukkan atau mengentri data penerima yang telah di usulkan masing-masing RT dan kesesuaian kriteria data penerima bantuan dilakukan oleh RT karena lebih paham dengan kondisiarganya. Hal ini mengkonfirmasi pernyataan informan sebelumnya bahwa ketidaktepatan sasaran disebabkan karena petugas kelurahan yang tidak melakukan verifikasi/validasi data penerima karena ketidakpahaman akan tupoksinya sehingga ditemukannya penerima yang tidak sesuai dengan kriteria yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran.

Permasalahan yang sama juga terjadi di Kelurahan Balai Makam, verifikator tidak mengecek secara langsung kondisi penerima yang berhak mendapatkan bantuan, hal ini disampaikan dalam wawancara berikut:

“kesesuaian kondisi penerima bantuan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan karena sebelum data di input, RT sudah mengecek terlebih dahulu warga yang berhak menerima bantuan.” Wawancara dengan Aisah selaku petugas verifikasi/validasi data penerima program paket sembako pasar murah bersubsidi di Kelurahan Balai Makam, tanggal 4 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, diketahui bahwa petugas verifikasi tidak mengecek kesesuaian kondisi penerima bantuan dengan persyaratan yang telah ditetapkan karena tugas tersebut telah dilakukan RT sebagai pengusul data penerima bantuan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa verifikator yang seharusnya mengecek kebenaran data penerima bantuan tidak paham dengan tugasnya.

Penetapan jumlah keluarga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan dengan banyaknya jumlah keluarga miskin yang berada dikelurahan tersebut, hal ini dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan dengan kasi kesejahteraan sosial dan budaya Kecamatan Mandau sebagai berikut:

“KPM ditetapkan berdasarkan banyaknya keluarga miskin dan kurang mampu yang berada di masing-masing kelurahan sehingga pemberian bantuan tersebut dapat disesuaikan.”. (wawancara Kasi Kesosbud sebagai pihak yang membidangi program paket sembako pasar murah bersubsidi di Kecamatan Mandau, Bapak Braja, pada hari Rabu, 19 Juni 2024).

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penetapan keluarga penerima bantuan ditetapkan berdasarkan banyaknya keluarga miskin dan kurang mampu yang berada di masing-masing kelurahan sehingga pemberian bantuan tersebut dapat disesuaikan.

Aparatur kelurahan di 11 Kecamatan pada program paket sembako pasar murah bersubsidi di Kabupaten Bengkalis sebelumnya telah diberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan program. Namun masih saja ditemukan kendala yang disebabkan oleh pihak kelurahan yang tidak paham dengan tupoksinya. Seperti yang diungkapkan Muhammad Samsi Nirwansyah, ST selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis berikut ini:

“setiap akan melaksanakan program kami selalu melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan program baik itu mekanisme maupun tugas masing-masing pelaksana. Namun masih saja ditemukan pihak kelurahan yang belum paham.” (Wawancara dengan Muhammad Samsi Nirwansyah, ST Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 17 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa meskipun sudah dilakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan program, termasuk mekanisme dan tugas masing-masing pelaksana, masih ada pihak kelurahan yang belum memahami tugasnya. pemahaman pelaksana terhadap program dan tugas merupakan hal penting agar program dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis telah berupaya agar program dapat berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala yang dapat menghambat tercapainya tujuan.

Program Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi Di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu memperoleh bahan makanan pokok yang mengalami kenaikan harga mendapatkan kebutuhannya dengan harga lebih murah. Namun pada pelaksanaannya hanya tiga jenis yang diberi subsidi yaitu

beras, minyak, dan gula dan bahan kebutuhan yang harganya sedang naik tidak disubsidi. Hal ini dijelaskan oleh salah satu KPM dalam wawancara sebagai berikut:

“program ini sangat membantu kami karena membantu mendapatkan beras,minyak dan gula dengan harga yang lebih murah, tapi alangkah baiknya jika yang diberi subsidi adalah bahan makanan yang sedang naik-naiknya karena harga yang dijual dipasar jauh dari harga pada saat normal. Misalnya telur sekarang lagi jauh naiknya karena natal dari dulu seapan harganya Rp.50.000 sekarang naik jadi Rp. 55.000” (wawancara dengan Deni selaku KPM paket sembako pasar murah bersubsidi, Pada Tanggal 30 Desember 2024)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat mengharapkan sembako yang disubsidi adalah sembako yang sedang naik harganya seperti pada bulan Desember 2024 ini yang naik adalah harga telur yang dulunya seapan seharga Rp.50.000 sekarang mengalami kenaikan Rp. 55.000 karena sedang dalam suasana natal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut mengenai “Efektivitas Pelaksanaan Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi Di Kabupaten Bengkalis”. Dalam hal ini Efektivitas merupakan hal yang penting menjadi fokus penelitian. Karena kondisi yang serupa, peneliti memutuskan untuk memusatkan penelitian pada tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Air Jamban, Kelurahan Balai Makam, dan Kelurahan Balai Raja. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pada kelurahan lain di Kabupaten Bengkalis yang memiliki karakteristik serupa seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono.⁸ Efektivitas dapat dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.⁹ Untuk dapat mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program Paket Sembako Pasar Murah Bersubsidi peneliti menggunakan Teori Efektivitas Program menurut Edy yang terdiri dari 5 variabel yang

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2008,Hlm 216

⁹ Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 92

memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan saling berinteraksi untuk mencapai efisiensi yang diinginkan.¹⁰

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program paket sembako pasar murah bersubsidi di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program paket sembako pasar murah bersubsidi di Kabupaten Bengkalis.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman dan menambah wawasan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Paket Sembako Murah Bersubsidi di Kabupaten Bengkalis.
2. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi yang berguna bagi para peneliti berikutnya.

¹⁰ Lizard, Revly Sian. 2017. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol.2, No.2

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik serta menambah wawasan mengenai program sembako bersubsidi, sekaligus sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur serta memperluas pemahaman terkait kajian yang membahas program bantuan pangan berupa subsidi sembako oleh pemerintah.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Paket Sembako Murah Bersubsidi di Kabupaten Bengkalis.

